



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BPBD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



NOMOR: 300.2.1 / / BPBD-I



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah diamanatkan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai oleh masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan sebagai penjabaran RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kerangka makro rencana pembangunan jangka menengah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang penjabarannya berpedoman pada Rencana Strategis yang efektif dan efisien yang mampu menghasilkan dampak pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan dampak lingkungan lainnya.

Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang serta penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan pendapat sehingga tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, diucapkan terima kasih.

Samarinda, 12 September 2025

Plt. Kepala Pelaksana,



Yasir, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197304051998031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisa	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal SKPD	27
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran	32
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	35
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode pertama (Satu), yang mana merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD, yang akan memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya. Dengan muatan renja seperti; program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

A. Maksud

- a. Menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2029;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

B. Tujuan

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2025 – 2029 yang dimanifestasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;
- f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Memberikan dasar dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (Performance Accountability Report);
- i. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga usaha dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalimantan Timur berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
BAB V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Capaian Renja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	22.106.416.375	0	86,60	86,60	39,81	7.129.655.940	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	47	32,25
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		100	100	100	40,00		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.244.381.231	100	100	100	50,00	82.974.700	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	6,67
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	324.549.164	...	6	6	3	21.093.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	6,5
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	63.830.000	...	1	1	1	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	0
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	67.359.671	...	1	1	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Perubahan RKA-SKPD											
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000	...	1	1	1	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	100	0
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.539.671	...	1	1	0	0	Dilaksanakan di triwulan 3	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	0	0
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	555.745.000	...	6	6	3	49.600.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	37,5	8,92
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	225.737.725	...	3	3	1	12.281.200	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	33,33	5,44

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	17.547.494.555	100	100	100	42,86	4.750.013.132	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	42,86	27,07
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	16.953.815.985	...	49	49	33	4.632.023.132	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	34,02	27,32
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.360.000	...	12	12	6	116.240.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	30,72
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.559.710	...	12	12	6	750.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0,9
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	85.360.000	...	12	12	6	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	5.607.944	...	12	12	6	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	21.253.944	...	12	12	6	1.000.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	4,71

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		KeuanganBulanan /Triwulanan/Seme steran SKPD											
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	19.536.972	...	12	12	2	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	0
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	9.340.000	100	100	100	66,67	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	66,67	37,13
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	97,71
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.400.000	...	1	1	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	30,36
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	460.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	97,61
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.233.027	100	100	80	47,78	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	47,78	0
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Dokumen	20.780	...	4	0	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	480.000	...	2	4	4	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	0
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18 Orang	480.000	...	18	2	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	0
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	10.408.247	...	25	18	25	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	138,89	0
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3.844.000	...	...	25	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.135.320.789	100	100	100	58,16	353.011.967	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	58	31,09
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.848.563	...	1	1	1,00	1.458.650	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	51,21
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	134.297.165	...	10	10	8,00	120.521.000	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	89,74

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	171.752.951	...	22	22	10	51.360.367	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	71,43	29,9
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	30.527.470	...	7	7	6	405.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	85,71	1,33
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	730.192.000	...	145	145	0	179.266.950	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	24,55
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	5.218.640	...	6	6	3	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	50	0
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	0	100	100	100	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	...	5	5	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.566.593.700	...	100	100	66,67	1.687.665.944	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	66,67	26.80

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	0
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.017.700	...	12	12	6	140.654.958	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	32,79
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.055.735.232	...	12	12	6	1.547.010.986	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	136,18
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	588.021.073	...	100	100	64,02	252.522.197	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	64,02	42,94
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	469.000.100	...	44	44	10	224.102.197	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	22,73	47,78
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	66.822.500	...	173	173	44	25.490.000	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	38,15

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2.933.333	...	2	2	2	2.930.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	99,89
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49.265.140	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	33,33	0
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	35.774.409.625	100	100	100	50	389.009.653	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	1,08
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %		100	100	100	50		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %		100	100	100	50		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	116.854.975	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi,	40 Orang	116.854.975	...	20	20	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 3 bulan juli 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota											
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	21.221.742.415	...	100	38,46	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategisKabupaten /Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	364.368.100	...	2	2	2	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan danmendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	20.192.377.391	...	13	13	3	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyesaian di triwulan selanjutnya	25	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	165.312.074	...	30	30	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yangmeningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	178.100.000	...	20	20	0	0	Dilaksanakan di triwulan 2 bulan Juni 2025	Dalam upaya penyesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaanmeng etahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	184.918.700	...	400	400	200	15.678.884	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 2 tanggal 26-27 April 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	20	7,94

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diridan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	136.666.150	...	60	60	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.008.757.330	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	68.400.000	...	12	12	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	418.298.000	...	10	10	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	522.059.330	...	800	800	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	13.427.054.905	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	103.342.790	...	60	60	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	13.010.980.795	...	6	6	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2.289.470	...	1	1	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	182.200.000	...	...	1	1	153.923.880	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84,48
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	781.000	...	2	2	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh	1 Dokumen	42.152.000	...	2	2	0	0	Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus 2025 Triwulan 3	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		tahapan(pra, saat dan pascabencana)											
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	231.011.350	...	10	10	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
GRAND TOTAL				57,731,734,000				3,869,436,079				15,87	6.70

Pelaksanaan Rencana Kerja 2026, baru dalam terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sehingga target yang ditetapkan akan dapat terealisasi pada pertengahan tahun kegiatan atau menjelang akhir anggaran. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rincian pelaksanaan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Program Penanggulangan Bencana, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dimana proses ataupun tahapan pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Upaya – upaya yang sekarang menjadi perhatian diantaranya adalah dengan meningkatkan evaluasi atas capaian kegiatan secara berkala setiap triwulan atas progres pelaksanaan kegiatan dan tentunya dari hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan beberapa kebijakan penyelesaian serta menjadi bahan pertimbangan atas penentuan target kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Di samping evaluasi capaian kinerja tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga telah membangun komitmen internal bersama yang harus dipedomani dan dipatuhi setiap proses pelaksana kegiatan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) termasuk dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi

Capaian Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan pada arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2019 – 2023 dan RPD 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan standar teknis pelayanan dan standar pelayanan minimal yang diberikan, dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah yang mengarah pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

Program yang dilaksanakan dari tahun 2019-2024 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 4 kegiatan yaitu; Layanan Informasi Rawan Kebencanaan, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi serta Layanan Penataan Sistem Dasar, dimana kegiatan layanan tersebut memfokuskan pada Indikator yang telah dirumuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.2

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RENSTRA 2019 - 2023																
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		N/A	85	85	85		N/A	98.04	100	100		N/A	115.3	117.6	117.6
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		N/A	80	80	80		N/A	78.37	80.46	82.89		N/A	97.96	100.6	103.6
RENSTRA 2024 - 2026																
1	Indeks Ketahanan Daerah	0.633	0.733	0.833			0.53					83.73				
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70.01	71	72			70.7					101				

Berdasarkan Rencana Strategis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terdapat perbedaan indikator dan target capaian IKU, dimana perubahan tersebut merupakan reviu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Capaian Kinerja yang ditetapkan pada masing-masing priode tersebut secara rata rata mencapai target yang ditetapkan. Jika dilihat capaian kinerja pada Priode renstra 2024-2026 pada sasaran Indeks Ketahanan Daerah yang pencapaian 0.43 indeks dari target yang ditetapkan sebesar 0.63 indeks, belum mencapai 100 % (83,73%). Bila diukur capaian kinerja berdasarkan target tujuan strategis, BPBD Provinsi Kaltim ditahun 2024 telah tercapai (Target IRB 2024 : 144,47; Realisasi IRB 2024 : 136,11), namun sasaran strategis yang merupakan arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut pada saat menetapkan target tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh adanya ketidaktepatan pada saat melakukan analisa rumusan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang mengakibatkan penetapan besaran target sasaran tidak berbanding lurus atau kurang tepat dalam menetapkan angka konversi dengan besaran target tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian Tahun Ke -			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	3	2	2	2	1	2	2	2	33.3	100	100	100
2	Persentase penanganan pra bencana	10	10	10	10	7	10	10	10	70	100	100	100
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100

Berdasarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) bahwa diakhir tahun 2024, persentase capaian IKK Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 100 %, sebagai berikut :

- a. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal adalah berupa dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar memahami tingkat kerentanan (*vulnerability*), ancaman (*hazard*), dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah terhadap bencana dalam menentukan langkah-langkah pengurangan risiko yang diimplementasikan dengan efektif melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
- b. Persentase Penanganan Pra Bencana yang memfasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada Permendagri 59 tahun 2021 dan terfasilitasi di 10 Kabupaten/Kota.
- c. Persentase penanganan tanggap darurat juga sudah terfasilitasi dengan penanganan bencana terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	

Dalam menetapkan dan mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk

kedalam Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum seta Perlindungan Masyarakat.

3.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2025 - 2029 antara lain adalah :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Belum padunya Dokumen Pengurangan Risiko Bencana kedalam kebijakan pembangunan daerah
 - Belum optimalnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dalam membangun sistem peringatan dini multi ancaman, pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan, pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas, serta pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.
 - Belum optimalnya penguatan mitigasi Struktural maupun dan Non Struktural serta Adaptasi Perubahan Iklim melalui Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan, penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana, Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi, peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Belum terpadunya penanganan bencana melalui sistem kaji cepat, dalam pengumpulan informasi kejadian bencana dan analisis Informasi sebagai rekomendasi untuk menentukan kebijakan penanganan bencana.

- Belum optimalnya mekanisme pada tingkat daerah terkait implementasi penetapan status darurat dan atau bahaya.
- Belum optimalnya sistem penyelamatan dan evakuasi, korban bencana terhadap kualitas dan kuantitas personil penanganan, perkuatan peralatan operasional perjenis bencana, serta jalur evakuasi.
- Lemahnya manajemen pengelolaan logistik serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana perkluster kebutuhan.
- Lemahnya kelembagaan pengendalian operasional, pengelolaan informasi, rencana operasional dan desiminasi informasi dalam penanggulangan bencana.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Belum optimalnya mekanisme pada tingkat daerah terkait implementasi penanganan pasca bencana.
- Belum tersedianya data aset pada daerah terdampak bencana dan kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap produk domestik bruto
- Belum optimalnya penyelenggaraan pasca bencana melalui pola kemitraan antar stakeholder terkait.
- Belum terukurnya pemulihan pasca bencana berdasarkan pada rekomendasi/kesepakatan yang tertuang dalam dokumen rahabilitasi dan rekonstruksi.

Dari uraian analisa faktor-faktor tersebut diatas dan berdasarkan atas kendala internal pada masing-masing bidang yang dihadapi, maka isu-isu strategis secara kolektif yang menjadi faktor penghambat bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Mitigasi, Peringatan Dini dan kesiapsiagaan

2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Kedaruratan dan logistik dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap penguatan regulasi, sistem kaji cepat, mekanisme penetapan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan pusat pendalian operasi penanggulangan bencana.

Belum Optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, data base aset dan kerugian, perkuatan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Telaah terhadap Rencana Kerja awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Review terhadap Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Lampiran Tabel 2.4

Tabel 2.4
BPBD Provinsi Kalimantan Timur

N o.	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Definitif (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretari atan	85 Indek s	18.635.096.028	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretari atan	85	18.635.096.028
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yg ditindaklan juti	80 %	3.153.806751			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yg ditindaklan juti	80 %	3.153.806751

N o.	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Definitif (Rp.)
JUMLAH					21.788.902.779					21.889.702.799
2	Program Penanggula ngan Bencana	Prov. Kalti m	Indeks Pra Bencana	0.077	2.550.000.000	Program Penanggula ngan Bencana	Prov. Kalti m	Persentas e Penangan an Pra Bencana	100 %	2.550.000.000
			Indeks Kedarurata n dan Logistik Peralatan	0,034	1.328.996.221			Persentas e Penangan an Tanggap Darurat	100 %	1.328.996.221
			Indeks Pasca Bencana	0.016	1.000.000.000			Persentas e Penangan an Pemuliha n Pascaben cana	100 %	1.000.000.000
JUMLAH					4.878.996.221					4.778.196.221
PAGU ANGGARAN					26.667.899.000					26.667.899.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029, yang kemudian akan dipaparkan melalui forum perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Perangkat Daerah lain yaitu khususnya ditekankan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan yang langsung ke masyarakat, pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Keterangan
I	Program Penanggulangan Bencana				
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	100 %	
			Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Keterangan
	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi Kaltim	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kawasan	Penguatan Destana, SPAB, RSAB
	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	600 Orang	Warga dan Aparatur yang terlibat dalam kesiapsiagaan
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	60 Keluarga	APD bagi Relawan
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	Penanganan bencana bagi masyarakat terdampak bencana
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	12 Laporan	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Penyediaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	
	pelatihan keluarga tanggap bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	60 keluarga	Keluarga yang mendapatkan edukasi tanggap bencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi; asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana

dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Dalam situasi darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

Dalam situasi pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan

pengurangan risiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam Sasaran Prioritas Gubernur yaitu pada **Sasaran 4** “Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan” sebagai Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah

Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	127,17 – 131,64
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,55

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	127,17 – 131,64
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,45
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa program utama (prioritas) untuk dilaksanakan pada periode Ranwal Renstra 2025 – 2029. Adapun rencana program utama yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tujuan dan sasarnya berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk mencapai program, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kegiatan tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, dan program pada Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur			26.667.899.000		25.168.975.984
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP (Nilai)	70.07					21.788.902.779		21.522.616.660
Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	Nilai LKjIP (Nilai)	70.07					21.788.902.779		21.522.616.660
			1.05.01.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80%	21.788.902.779	80%	18.492.976.263
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks		85 Indeks	3.029.640.397
			1.05.01.1.01	Perencanaan. Penganggaran. dan	Persentase Dokumen Perencanaan dan	100%	699.459.806		799.999.984

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu				
			1.05.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	147.204.266	6 Dokumen	164.944.444
			1.05.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.907.200	1 Dokumen	25.907.200
			1.05.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.907.200	1 Dokumen	25.907.200
			1.05.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.757.200	1 Dokumen	2.757.200

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
			1.05.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.757.200	1 Dokumen	2.757.200
			1.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	225.742.100	4 Laporan	261.742.100

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	269.184.640	3 Laporan	315.984.640
			1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	17.760.536.279	100%	17.652.976.279
			1.05.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Org/Bln	17.332.176.279	90 Org/Bln	17.332.176.279
			1.05.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	295.800.000	4 Dokumen	295.800.000
			1.05.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	38.382.888	4 Dokumen	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	67.200.000	12 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.251.060	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	20.561.760	4 Laporan	5.000.000
			1.05.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	4 Dokumen	2.164.292	4 Dokumen	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran				
			1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	53.560.950	100%	15.000.000
			1.05.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.660.100	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.660.100	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.240.750	1 Laporan	5.000.000
			1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	121.538.993	100%	25.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	96.934.493	1 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.932.200	4 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.136.200	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.136.100	2 Orang	5.000.000
			1.05.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	2.400.000	30 Orang	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	615.626.702	100%	341.460.348
			1.05.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik. Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	25.630.428	7 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.246.505	7 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	50.478.274	7 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	40.357.395	6 Paket	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	390.000.000	4 Laporan	316.460.348
			1.05.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	13.914.100	2 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	18.665.378	100%	93.665.378
			1.05.01.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	18.665.378	1 Paket	18.665.378
			1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa	Persentase Kelancaran	100%	1.805.427.400	100%	1.805.427.400

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Kantor				
			1.05.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.698.524	1 Laporan	10.698.524
			1.05.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.008.876	12 Laporan	429.008.876
			1.05.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.365.720.000	12 Laporan	1.365.720.000
			1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100%	714.087.271	100%	789.087.271

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan n. Biaya Pemeliharaan n. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	580.042.098	44 Unit	580.042.098
			1.05.01.1.09.006	Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	114.941.220	173 Unit	114.941.220
			1.05.01.1.09.008	Pemeliharaan n Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	19.103.953	4 Unit	19.103.953
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	127.17 – 131.64					4.878.996.221		3.646.359.324
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.55					4.878.996.221		3.646.359.324
			01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pasca Bencana	0.016 Indeks	1.000.000.000	0.017 Indeks	679.271.865
					Indeks Kedaruratan	0.034 Indeks	1.328.996.221	0.035 Indeks	886.589.831

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					dan Logistik Peralatan				
					Indeks Pra Bencana	0.077 Indeks	2.550.000.000	0.079 Indeks	2.080.497.628
			1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	494.198.220	100%	250.000.000
			1.05.03.1.01.003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	334.992.200	1 Dokumen	150.000.000
			1.05.03.1.01.004	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi. komunikasi. informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas	60 Orang	159.206.020	60 Orang	100.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					Kabupaten/Kota				
			1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	100 %	1.480.357.920	100 %	1.554.589.831
					Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %		100 %	
			1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	244.701.860	2 Kawasan	100.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	600 Orang	423.322.020	600 Orang	200.000.000
			1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	130.024.780	30 Orang	100.000.000
			1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan	Jumlah keluarga yang	60 Keluarga	331.777.410	60 Keluarga	400.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
			1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	234.367.960	12 Dokumen	144.589.831

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	20 Orang	116.163.890	20 Orang	200.000.000
			1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	964.603.481	100%	642.000.000
			1.05.03.1.03.0025	Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	53.999.120	12 Laporan	42.000.000
			1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi	800 Orang	665.661.901	800 Orang	400.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Korban Bencana	Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
			1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	244.942.460	12 Laporan	200.000.000
			1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana	100%	1.939.836.600	100%	1.209.769.493
					Persentase Layanan Pasca Bencana	100%		100%	
					Persentase Legislasi. Kelembagaan. dan Pembinaan Penanggulanga n Bencana	100%		100%	
			1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	79.601.870	60 Keluarga	100.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.03.1.04.007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	477.086.020	1 Dokumen	215.000.000
			1.05.03.1.04.008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	11.230.500	1 Laporan	100.000.000
			1.05.03.1.04.011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan. pengalokasian sumber daya dan	12 Laporan	167.616.474	12 Laporan	175.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					ketersediaan APBD. non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan. pemantauan. evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi				
			1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat. dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	18 Lembaga	162.543.994	18 Lembaga	139.271.865
			1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca	Jumlah Aparatur	130 Orang	192.753.512	130 Orang	150.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Bencana Provinsi	BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				
			1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	607.372.000	1 Dokumen	180.497.628
			1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	138.858.110	1 Dokumen	50.000.000
			1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan	Jumlah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	102.774.120	10 Kab/Kota	50.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	ta yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, sebagai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Kedepannya, BPBD Provinsi Kalimantan Timur masih perlu menyesuaikan / perbaikan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

Samarinda, 12 September 2025

Plt. Kepala Pelaksana,



Yasir, S.E M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197304051998031007

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009